

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan Lambung Bukit masih ditemukan ketidaksesuaian data yang dijadikan dalam pemberian bantuan yang tercantum pada DTKS dengan yang dilapangan, dimana ditemukan masyarakat yang sudah pindah domisili maupun masyarakat yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam DTKS penerima bantuan beralamat di kelurahan Lambung Bukit. Karena lemahnya pembaruan data yang dilakukan mengakibatkan masih adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Pada proses penyaluran bantuan kepada Masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit masih belum efektif dikarenakan ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan dan adanya ketidaktransparansian pemerintah terhadap penyebab bertambah atau berkurangnya orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan Lambung Bukit ada dua jenis, yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis, berikut uraian kendala tersebut:
 - a. Kendala yuridis

Pada Peraturan Walikota Padang No. 41.A Tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan walikota Padang Nomor 27 Tahun 2020

Tentang Pemberian Bantuan Uang Tunai Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 pada Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa, “untuk mendapatkan bantuan, masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan, namun nyatanya masih ada warga yang sudah pindah dan meninggal namun warga yang menerima bantuan tersebut tidak melaporkan kepada pihak kelurahan terkait surat pindah domisili maupun surat kematian sehingga warga tersebut masih terdata sebagai penerima bantuan.

b. Kendala non yuridis

Kendala non yuridis dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tunai yaitu keterbatasan masyarakat dalam mengetahui alur penerima bantuan sosial, kurangnya jumlah tenaga aparatur, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program bantuan sosial, informasi atau data pribadi penerima tidak lengkap data, dan beberapa KPM tidak datang ke lokasi penyaluran.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat terkait alur penerima bantuan sosial tunai, agar masyarakat lebih mengetahui kriteria penerima bantuan sosial ini.
2. Kepada pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan data penerima bantuan secara berkala agar program bisa lebih tepat sasaran sehingga pelaksanaan program bantuan sosial selanjutnya dapat lebih efektif.

3. Kepada pemerintah diharapkan untuk konsisten dalam membuat peraturan terkait penerimaan bantuan sosial tunai agar masyarakat dapat memahami terkait kriteria dan penerimaan bantuan sosial tunai

